

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar

Mirda Syam¹ Dahliah² Nasir Hamzah³

Email

mirdasyam028@gmail.com¹, dahliah.dahliah@umi.ac.id², nasir.hamzah@umi.ac.id³

Universitas Muslim Indonesia^{1,2,3}

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pendapatan asli daerah dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2009 sampai 2018. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan variable tetap adalah pendapatan dan dana perimbangan dan variable bebasnya adalah pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian bahwa Dana Perimbangan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mengindikasikan bahwa ketergantungan Kota Makassar terhadap pemerintah pusat sangat tinggi yang tercermin dari lebih besarnya jumlah Dana Perimbangan di Sbanding Pendapatan Asli Daerahnya. Ketidak seimbangan fiskal yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah selama ini telah menyebabkan ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada bantuan dari pemerintah pusat. Adapun hubungan PAD dan DP terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang sejalan dengan penelitian Wisda (2014:76) bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga penulis mengasumsikan bahwa teori Ricardian Equivalence (RE) berlaku untuk wilayah Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar dapat melakukan optimasi untuk mencapai tujuan pembiayaan daerahnya. Teori (RE) pada dasarnya merupakan pengembangan teori pendapatan permanen dan hipotesis siklus hidup (Permanen income and Life Cycle atau PILCH)

Keyword : *Pendapatan Asli Daerah , Dana Perimbangan , Pertumbuhan Ekonomi*

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan fenomena yang penting dialami dunia hanya semenjak abad dua belakangan ini. Dalam periode tersebut dunia telah mengalami perubahan yang sangat nyata apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sampai ke abad-18 kebanyakan masyarakat diberbagai negara masih hidup dalam taraf subsisten dan mata pencarian utamanya adalah dari melakukan kegiatan di sektor pertanian, perikanan atau berburu. (Sukirno, 2013 :421)

Ditinjau dari segi sudut ekonomi, perkembangan ekonomi dunia yang berlaku semenjak dua abad yang lalu menimbulkan dua efek penting yang sangat menggalakkan yaitu kemakmuran dan taraf hidup masyarakat makin meningkat dan dapat menciptakan kesempatan kerja yang baru kepada penduduk yang terus bertambah jumlahnya.

Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa, yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi modal. Tetapi dengan menggunakan jenis data adalah sangat sukar memberi gambaran tentang pertumbuhan ekonomi yang dicapai.

Kinerja perekonomian suatu daerah dikatakan baik ditentukan oleh salah satu indikator makroekonomi dalam melaksanakan pembangunan daerah tersebut ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah atau negara dalam suatu periode tertentu.

Pembangunan nasional adalah serangkaian usaha pembangunan yang berkelanjutan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil dan Makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan nasional diarahkan kepada pembangunan yang merata kesetiap daerah yang cenderung masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatan.

Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran serta pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing upaya memperbesar kemampuan daerah. Untuk itu peningkatan harus di dukung pembangunan daerah yang dilakukan secara serasi dan terpadu dalam mewujudkan pembangunan nasional.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah dan masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta yang akan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dan wilayah tersebut.

Kebijakan tentang otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang dilakukan berdasarkan Undang-undang (UU) telah membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan harapan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah. Kebijakan tersebut ditanamkan pemerintah melalui UU nomor.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang revisi dengan UU nomor 32 tahun 2004 dan UU nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah yang di revisi dengan UU nomor 33 tahun 2004. Kebijakan tersebut bisa dilihat dari dua sudut pandang, sudut pandang yang pertama adalah tantangan, yang kedua adalah peluang bagi pemerintah daerah (pemda). Hal tersebut dikarenakan dalam UU tersebut diamanatkan suatu kewenangan otonomi yaitu agar daerah melaksanakan pembangunan disegala bidang, terutama pembangunan sarana dan prasarana publik (public service).

Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah, baik dari sisi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk membantu dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antara daerah, pemerintah daerah di harapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi

kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 10 menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (capital investment) antar lain berasal dari PAD dan dana perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat. Dan perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil, Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Selain itu juga terdapat sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa pinjaman daerah.

Oleh sebab itu, tuntunan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya bagi daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal daerah (Halim,2001:63). Daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan porsi belanja daerah yang sangat lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemerintah Daerah (pemda) setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal. Semakin tinggi investasi modal diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD.

Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi.

Otonomi daerah merupakan realisasi dari ide desentralisasi. Menurut Sidik (2002:46), konsep desentralisasi terdiri dari desentralisasi politik (political decentralization), dan desentralisasi administrative (administrative decentralization), dan desentralisasi fiskal (fiscal decentralization). Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah dalam mengembangkan potensi masing-masing. Menurut Saragih (2003:74), otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom. Menurut Susanti (2008:85), dengan adanya desentralisasi fiskal, daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerahnya sehingga mampu bersaing dengan daerah lain melalui penghimpunan modal untuk kebutuhan investasi dan atau kemampuan berinteraksi dengan kemampuan lain.

Landasan dari pelaksanaan desentralisasi adalah untuk memenuhi tujuan demokratisasi dan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, kebijakan desentralisasi ini dimaksudkan untuk menciptakan proses pengambilan keputusan public yang demokratis dan memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Terkait dengan tujuan kesejahteraan, diharapkan pemerintah daerah untuk bisa menyediakan pelayanan public kepada masyarakat lokal secara ekonomis, tepat guna dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Desentralisasi juga diharapkan bisa mengurangi kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan mendorong pendapatan perkapita masyarakat dan daya beli lewat pembangunan ekonomi pembangunan ekonomi yakni pembangunan pada sektor-sektor tertentu yang menjadi prioritas, karena bersangkutan dengan kebutuhan masyarakat lokal (Susiati 2017:93).

Implikasi dari pemberian kewenangan otonomi daerah adalah menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan yang diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari sisi perencanaan pembangunan, serta pembiayaannya. Pembangunan yang dilaksanakan akan memberikan banyak manfaat bagi daerah diantaranya, (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat, (2) mendorong perkembangan perekonomian daerah, (3) mendorong peningkatan pembangunan daerah disegala bidang, (4) meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, (5) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan (6) mendorong kegiatan investasi (Sidik, 2004:39)

Oleh Karena itu, dengan meninjau kembali pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar yang tidak banyak di ikuti dengan pertumbuhan ekonominya, maka hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian di Kota Makassar

Dapat kita lihat pada tabel berikut tentang jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, pada kantor Badan Pusat Statistik Makassar(BPS). Adapun jangka waktu penelitian ini hingga perampungan di perkirakan kurang lebih dua bulan, yaitu mulai bulan february sampai dengan maret. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non perilaku. Dimana observasi non perilaku adalah metode pengumpulan data dimana penelitian tidak terlibat, hanya saja sebagai pengamat independent. Dengan metode ini semua data diperoleh melalui pengumpulan data dengan cara mengamati, mencatat dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yang di maksud untuk memberikan gambaran secara mendasar dan benar. Metode yang digunakan penulis adalah pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga/institusi dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain.

Data yang penulis maksud dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Makassar. Data yang diperoleh adalah hasil akhir berupa penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan 2009-2018.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder juga merupakan data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan peneliti itu sendiri. Data ini biasanya berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi. Data sekunder yang digunakan peneliti ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar.

Untuk menyamakan persepsi tentang variabel-variabel yang digunakan dan

terjadinya perbedaan penafsiran, maka penulis memberikan balasan-balasan defenisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (X1) adalah sumber PAD yang berasal dari total pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan dinyatakan dalam satuan rupiah tahun 2009-2018 di Kota Makassar.
2. Dana Perimbangan (X2) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Kota Makassar untuk mendanai kebutuhan daerah. Dana perimbangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah akumulasi keseleuruhan total sumber pendanaan dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, DBH Kota Makassar yang dinyatakan dalam rupiah tahun 2009-2018.
3. Pertumbuhan Ekonomi (Y) adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang dilihat dari peningkatnya PDRB Kabupaten/Kota. PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB dasar harha konstan dalam satuan rupiah tahun 2009-2018.

Hasil dan Pembahasan

Statistik deskriptif dilakukan untuk menunjukkan jumlah data (N) yang digunakan dala penelitian ini serta untuk menunjukkan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean) serta standar deviasi dari masing-msing variabel yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini hendak menguji pengaruh variabel independen yaitu PDRB atas dasar Harga konstan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DP) sebagai variabel dependen. Adapun hasil perhitungan statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pertumbuhan Ekonomi	7.1135	3.07093	10
PAD	27.0640	7.0448	10
Dana Perimbangan	27.7450	3.0376	10

Sumber Output SPSS 25 (data diolah)

Variabel PAD (Pendapaan Asli Daerah) selama periode pengamatan 2009- 2018 meiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 27.064 denan nilai standar deviasi sebgai

7.044 yang menunjukkan bahwa nilai standat deviasi lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata (mean). Hal ini mengindikasikan bahwa data variabel PAD selama periode 2009-2018 dapat dikatakan baik.

Variabel DP (Dana Perimbangan) selama periode pengamatan 2009-2018 memiliki rata-rata (mean) sebesar 27.745 dengan nilai standar deviasi sebagai 3.037 yang menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan nilai rata- rata (mean). Hal ini mengindikasikan bahwa data variabel Dana Perimbangan selama periode 2009-2018 dapat dikatakan baik.

Variabel PDRB selama periode pengamatan 2009-2018 memiliki nilai rata- rata

(mean) sebesar 7.113 dengan nilai standar deviasi sebagai 3.070 yang menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih besar dibandingkan nilai rata-rata (mean).

Persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y(\text{PDRB}) = -47,300 + 3,267X_1 + (-1,225)X_2$$

Dari persamaan regresi maka dapat diinterpretasikan beberapa hal, antara lain :

1. Nilai konstanta persamaan di atas sebesar -47,300. Angka ini menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen di asumsikan konstan, maka variabel dependen yaitu nilai PDRB mengalami penurunan sebesar -473%
2. Variabel PAD memiliki nilai koefisien regresi yaitu 3,267. Nilai koefisien regresi yang positif ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap nilai PDRB. Hal ini berarti setiap kenaikan PAD sebesar 1 persen maka nilai PDRB akan mengalami kenaikan sebesar 32% dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dianggap konstan.
3. variabel DP memiliki nilai koefisien regresi yaitu -1,225. Nilai koefisien regresi yang negatif ini menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap nilai PDRB akan mengalami penurunan sebesar -1,22% dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dianggap konstan.

Nilai R menerangkan tingkat hubungan antara variabel-variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). pada tabel di atas dilihat bahwa nilai R sebesar 0,673 atau 67,3%. Hal ini berarti hubungan antara variabel independen yaitu PAD dan DP terhadap PDRB adalah 67,3%. Angka sebesar 67,3% mengindikasikan bahwa PAD dan DP memiliki hubungan yang kuat dengan PDRB.

Nilai R Square (R^2) pada tabel 13 sebesar 0,453 atau 45,3%. Artinya variabel independen yaitu PAD, dan DP dapat menerangkan variabel dependen yaitu PDRB sebesar 45,3% atau R^2 sebesar 0,453 menunjukkan adanya perubahan-perubahan sebesar 45,3% yang terjadi pada nilai PDRB yang disebabkan oleh PAD dan DP.

Adjusted R square merupakan nilai R Square yang telah disesuaikan nilai ini selalu lebih kecil dari R Square dan angka ini bisa memiliki nilai negatif, dari tabel 13 dapat dilihat nilai Adjusted R Square sebesar 0,297 atau 29,7%.

Standard Error of the estimate adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksikan nilai Y. Dari hasil regresi di dapat nilai 2.57535% hal ini berarti banyaknya kesalahan dalam prediksi PDRB. Sebagai pedoman jika *standard error of the estimate* kurang dari standar deviasi Y, maka model regresi semakin baik dalam nilai Y.

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung lebih sebesar 84,875 dengan signifikan sebesar 0,121. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu PAD dan DP tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi sehingga hipotesis yang diajukan ditolak.

Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Makassar dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan perkembangannya di dalam menunjang

pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di Kota Makassar berikut ini peneliti menyajikan data tentang perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah sejak tahun 2009-2019.

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2009-2018

No.	Tahun	PAD (Miliar Rupih)	Pertumbuhan (%)
1	2009	170.698.725.818,79	96,64%
2	2010	210.136.331.090,64	96,86%
3	2011	351.692.552.587,60	101,84%
4	2012	491.067.365.846,77	111,29%
5	2013	619.593.144.214,74	108,75%
6	2014	730.988.641.340,67	87,89%
7	2015	828.871.892.852,66	83,54%
8	2016	971.859.753.605,76	75,57%
9	2017	1.337.231.047.257,10	90,06%
10	2018	1.185.453.010.989,65	78,85%
Total		6.012.974.824.264	931.29%
Rata-rata		601.297.482,426	93.129%

Sumber : BPS Kota Makassar, Data Diolah

Pada tabel 2 perkembangan PAD Kota Makassar di tahun 2009 Rp. 170.698.725.818,79 mengalami kenaikan hingga tahun 2017 Rp. 1.337.231.047.257,10 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 Rp. 1.185.453.010.989,65. Secara keseluruhan total PAD tahun 2009-2018 sebesar Rp. 6.012.974.824.264 miliar rupiah atau total rata-rata Rp. 601.297.482,426 dengan total pertumbuhan rata-rata 93.129%

Dari hasil regresi diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yaitu 3,267 dan nilai probabilitas 0,909 > 0,05. Hasil hipotesis pada awal penelitian tidak sesuai yang menduga PAD berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar. Hasil penelitian yang menunjukkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hal ini menjadi indikasi bahwa derajat kemandirian keuangan Kota Makassar masih rendah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang sangat mempengaruhi karena sebagai pendapatan yang dihasilkan sendiri dan dimanfaatkan secara leluasa oleh daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah perlu mendapat perhatian khusus oleh pemda setempat dalam rangka mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah.

Perkembangan Dana Perimbangan setiap tahunnya mengalami kenaikan di Kota Makassar di tahun 2009 realisasi Rp. 833.834.215.606,00 hingga tahun 2018

Rp.1.808.260.589.494,00. Total Dana Perimbangan dari tahun 2009-2018 adalah Rp. 28.225.545.106.855 dengan rata-rata Rp. 2.822.554.510.686 atau 98.706%. Variabel Dana Perimbangan (DP) dari hasil penelitian diperoleh hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yaitu -1,225 dan nilai probabilitas $0,759 > 0,05$. Nilai koefisien regresi yang positif ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap nilai PDRB. Hal ini berarti setiap kenaikan Dana Perimbangan sebesar 1 persen maka nilai PDRB atau Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar akan mengalami kenaikan sebesar -1,22% dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain di anggap konstan. Nilai probabilitas $0,759 < 0,05$ diartikan Dana Perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal bahwa Dana Perimbangan (DP) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar.

Dari hasil penelitian bahwa Dana Perimbangan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mengindikasikan bahwa ketergantungan Kota Makassar terhadap pemerintah pusat sangat tinggi yang tercermin dari lebih besarnya jumlah Dana Perimbangan di banding Pendapatan Asli Daerahnya. Ketidak seimbangan fiskal yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah selama ini telah menyebabkan ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada bantuan dari pemerintah pusat. Padahal sebenarnya bantuan dana dari pemerintah pusat tersebut hanyalah untuk rangsangan bagi daerah agar lebih meningkatkan sumber penerimaan pendapatan asli daerahnya, yang merupakan bagian penting dari sumber penerimaan daerah, bukan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam penerimaan daerah.

Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan penelitian ini, yakni: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. 2) Dana Perimbangan (DP) memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.

Saran

Berdasarkan penelitian ini, maka penulis menyarankan hal-hal yang perlu diperhatikan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan suatu daerah. Adapun beberapa usulan yang ditujukan untuk pemerintah untuk meningkatkan PAD, diantaranya: 1) Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dari sector andalan. 2) Adanya keseimbangan insentif dan disinsentif untuk menjamin kepatuhan. 3) Mengoptimalkan peran legislative. 4) Meningkatkan efisiensi pelayanan public. 5) Kendalikan KKN dalam sistem pemungutan pajak dan retribusi. 6) Meningkatkan jaminan keadilan bagi wajib pajak/retribusi.

Referensi

- Andi Muhammad Farid. 2016. **Pengaruh Belanja Daerah dan Pertumbuhan Makassar**. Studi kasus Kabupaten Kota/Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Diakses 20 februari 2018
- _____, 2004. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah**.
- _____, 2004. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Pengaturan Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah**.
- _____. 2004. **Ekonomi Pembangunan**. Yogyakarta: YKPN.
- Ghizali, Imam. 2006. **Aplilasi Analisi Muktivarian dengan Program SPSS**. Edisi ke-4. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hasan, Iqbal, 2003, **pokok-pokok Materi Statistik 1**. Edisi kedua. PT. Bumi Aksara Jakarta.
- Halim, Abdu, 2001. **Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Jhingan, M.L, 2016, **Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan**, penerjemah D.Guritno, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nugroho, Riant D. 2005. **Kebijakan Publik Furmulasi, Implementasi dan Evaluasi**. Jakarta: Alex Media Komputindo Raharjo Mudjia.
- Rijal, Muhammad. 2015. **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Makassar**. Tahun 2008-2012 Studi Kasus Kabupaten/Kota Makassar Povinsi Sulawesi Selatan. Diakses 20 februari 2018.
- Rochjadi, Achamd. 2006, **Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah tahun 2004-2005**. Jakarta. Kementrian Keuangan.
- Siahana, Marihot P. 2005. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sidik, Mahfud. 2002. **Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah: Antara Teori dan Aplikasinya Di Indonesia**.
- Simonsen Sianturi, 2017. <http://eprints.Undip.ac.id/29289/1/Jurnal.pdf>
- _____, _____ 2017. <http://.defenisi-pengertian.com/2015/06/pengertian-dan-konsep-dana-perimbangan.html>
- sulfiadi. 2015. **Pengaruh Belanja Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makassar Tahun 2008- 2012**. Studi Kasus Kabupaten /Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Diakses 20 februari 2018.
- Suryana, 2000. **Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan**. Yogyakarta.
- www.scribd.com
- www.scribd.com/doc/216770868/Makalah-Dana-Perimbangan